LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dengan baik.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun **2021 ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbag**ai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660530 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. DASAR HUKUM 1

1.3. MAKSDU DAN TUJUAN 4

1.4. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN 5

1.5. TIPOLOGI DINAS PERHUBUNGAN 9

1.6. PROPORSI PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **12**

2.1. VISI DAN MISI 12

2.1.1. VISI 12

2.1.2. MISI 14

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAN DINAS PERHUBUNGAN 15

2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 18

2.3.1. ARAH KEBIJAKAN 18

2.3.2. STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN 18

2.4. PRIORITAS DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN 22

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN 25

2.5.1. PROGRAM 27

2.5.2. KEGIATAN 29

2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA 30

2.7. PERJANJIAN KINERJA 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **42**

3.1. CAPAIAN PROGRAM 42

3.2. CAPAIAN KELUARAN *(OUT PUT)* 44

3.3. PENGUKURAN KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA 88

3.4. CAPAIAN FISIK KEGIATAN TAHUN 2020 DAN DANA AKUNTABILITAS KEUANGAN 92
3.5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 103
3.5.1. PERMASALAHAN 103
3.5.2. SOLUSI 104

BAB IV PENUTUP 106
4.1. KESIMPULAN 106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Awal tahun 2020 terjadi penyemberan virus Covid-19 dimana gejala ini menjadi pandemik sekala Nasional dan bahkan sekala Internasional, dampak dari pandemik ini mengakibatkan jenuhnya perekonmian indonesia dimana semua wilayah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang dimaksudkan untuk membatasi pergerakan orang guna mencegah penularan virus ini, hal ini juga mengakibatkan kegiatan perekonomian menurun.

Berbagai macam cara dilakukan untuk mengatasi bencana global seperti ini, sebagai dampak dari PSBB ini Pemerintah Provinsi Banten melakukan refokusing anggaran pada penganggaran 2020 dimana refokusing anggaran ini terjadi sebanyak 3 kali.

Refokusing anggaran pada tahun 2020 dilakukan oleh setiap OPR Provinsi Banten. Dinas Perhubungan Provinsi Banten melakukan refokuisng anggaran sesuai denga aturan yang telah ditetapkan. Refokusing anggaran yang dilakukan berdampak pada pengurangan target kinerja dimana pada refocusing ini banyak kegiatan pada Dinas Perhubungan tidak dilaksanakan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DInas Perhubungan Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand DesignReformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem AkuntabitasKinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangRPJMN 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 517);
15. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi BantenTahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi BantenNomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, TambahanLembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (LembaranDaerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi BantenTahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem danProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita DaerahProvinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2007tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ProvinsiBanten;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah Provinsi Banten; Dinas Sosial Provinsi Banten
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di LingkunganPemerintah Provinsi Banten;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit PelaksanaTeknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
24. Perda Prov Banten No. 6 Tahun 2020 ttg APBD TA 2021, Lembaran Daerah Tahun 2020 No. 6 tanggal 30 Desember 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 16);
25. Pergub Banten No. 68 Tahun 2021 ttp Penjabaran APBD TA 2021, Berita Daerah Tahun 2020 No. 69 tanggal 30 Desember 2020

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuannya adalah:

a. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dinas dalam penyusunanlaporan akhir atau tahunan;

b. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2019;

c. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2019, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun berikutnya.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Banten diatur menurut Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten, sebagai berikut:

I. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi;

II. Fungsi dan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Banten:

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
3. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;
4. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
5. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
6. Penyelenggaraan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi;
7. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

8. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
9. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
10. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
12. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
13. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
14. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
15. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi;
16. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;

17. Penerbitan rekomendasi izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;
18. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
19. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah abupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
20. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
21. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi;
22. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
23. Pembangunan, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
24. Pembangunan dan penerbitan rekomendasi izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
25. Penerbitan rekomendasi izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
26. Penerbitan rekomendasi izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;

27. Penerbitan rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
28. Penerbitan rekomendasi izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
29. Penerbitan rekomendasi izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
30. Penerbitan rekomendasi izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
31. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
32. Penerbitan rekomendasi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota;
33. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
34. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
35. Penerbitan rekomendasi izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
36. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi;
37. Penerbitan rekomendasi izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
38. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5. TIPOLOGI DINAS DINAS PERHUBUNGAN

Tipologi Dinas Perhubungan Tipe A terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian. Masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) seksi. Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

A. Kepala Dinas;

B. Sekretaris, terdiri atas:

   1. Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan;
   2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

C. Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana, terdiri atas:

   1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang;
   2. Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multimoda;
   3. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

D. Kepala Bidang Lalulintas, terdiri atas:

   1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan;
   2. Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi Darat;
   3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ.

E. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri atas:

   1. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi;
   2. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan;
   3. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi.

F. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri atas:

   1. Kepala Seksi Perhubungan Udara;
   2. Kepala Seksi Kepelabuhan dan ASDP;
   3. Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

H. Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten

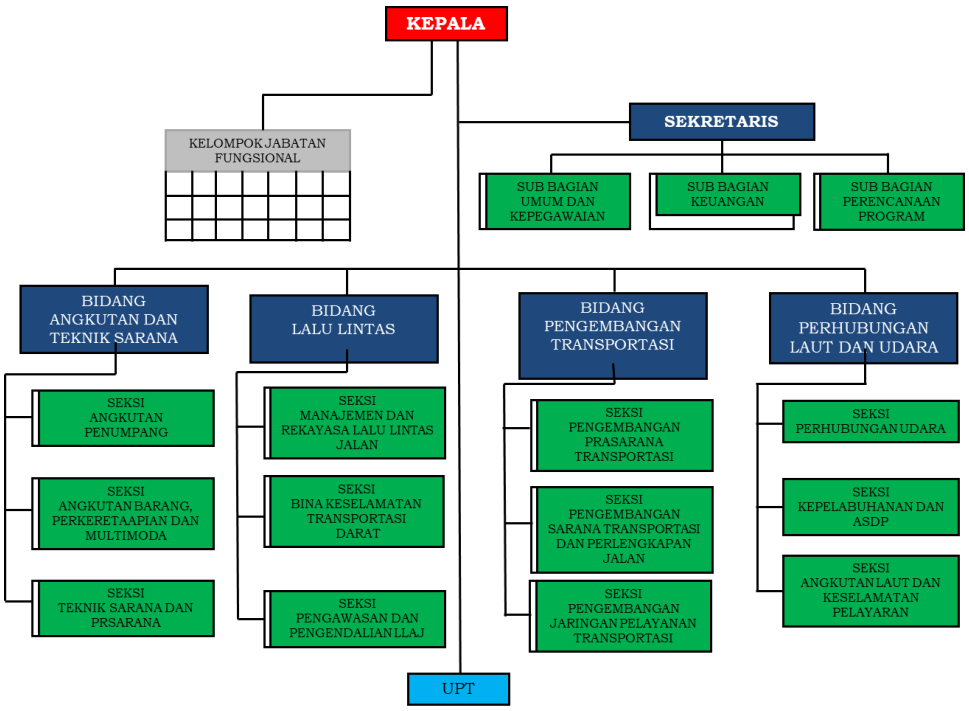

Gambar 1.1. Struktur organisasi dinas perhubungan

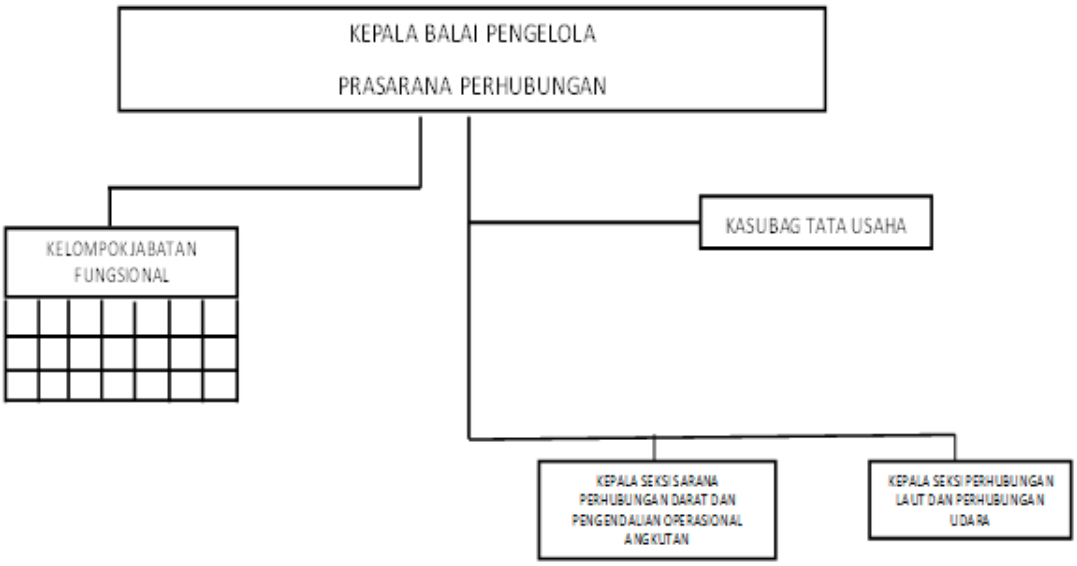

Gambar 1.2. Struktur organisasi balai pengelolan prasarana perhubungan

1.6. PROPORSI PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perhubungan didukung oleh pegawai yang terdiri dari ASN dan NON ASN dengan total 381 orang dengan rician sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Tabel Pegawai Pegawai Berdasarkan Status

STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS	82	20	**102**
NON PNS	252	27	**279**
JUMLAH	**334**	**47**	**381**

Berdasrkan tabel diatas dapat di jabarkan bahwa jumlah pegawai ASN/PNS sebanyak 102 orang dan pegawai NON PNS sebanyak 279 orang dimana jumlah pegawai ASN laki-laki sebanyak 82 orang dan Perempuan sebanyak 20 orang, sedangkan jumlah pegawai NON ASN laki-laki berjumlah 279 orang dimana Jumlah Pegawai Non ASN laki-laki sebanyak 252 dan Perempuan berjumlah 27 orang, untuk data pegawai Dinas Perhubungan perdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA JANGKA MENENGAH/RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan mengacupada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022, Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah menyusun rencana jangka menengah sebagai acuandalam pelaksanaan pembangunan bidang Perhubungan kedalam RencanaStrategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2017 -2022.

2.1.1. VISI

Visi RPJMD 2017-2022 **“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”**. Maksud dari Visi adalah sebagai berikut;

“Maju”

Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola permerintahan yang menerapkan prirìsip -prinsip good governanace.

Beberapa indikator indikator pengeloiaan pemerintahan yang lebíh majuadalah : adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif,transparan, akuntabel disertal perbaikan hubungan kelembagaan dengankabupaten/kota), dan adanya perubahani mindset atau perubahan budaya lamayang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

“Mandiri”

Provinsi Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerahuntuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakanmandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidaktergantung oleh bantuan atau subsildi pemerintah pusat. Beberapa indikatorMandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasïkanberbagai program pemerintah daerah.

“Berdaya Saing”

Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengeloladan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagalhambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerahlainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dandaya tarik ìnvestasi di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastianhukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.

“Sejahtera”

Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalammengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapian angka IndeksPembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angkaIndeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tigaindikator utama yaítu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikatorkesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

“Berakhlakul Kharimah”

Provinsi Banten yang Akhlakul Karìmah berarti harapan daerah dalammenekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yangmencerminkan penerapan nilai - nilai agama, yaitu nilai - nilai yang sesuai denganhakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seìsinya.Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umatberagama pada masyarakat, implemetasi terhadap rumusannya pada

lingkunganaparatur permerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan dengan partisipasitokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten.

Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada periode 2017-2022. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diuraikan dalam beberapa misi.

2.1.2. MISI

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**

   ditujukan untuk Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Daerah yangberakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dansumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi;

2. **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur**

   ditujukan untukMeningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas, berorientasi pada peningkatan pembangunan manusia dan perekonomian daerah;

3. **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas**

   ditujukan untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;

4. **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas**

   ditujukan untuk Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan Banten menujusumber daya manusia Banten yang berdaya saing;

5. **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**

Ditujukan untuk Meningkatan perekonomian banten melalui kualitas pengelolaankeuangan, Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Banten yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Tugas pokok ini mencerminkan misi pertama, Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan misi kedua Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan dan sasaran ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi dibidang transportasi berkewajiban untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut diatas, **Dinas Perhubungan menetapkan tujuan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:**

1. Menyiapkan aparatur yang memiliki integritas dan profesional;
2. Menyiapkan sarana prasarana pendukung dan mewujudkan pelaksanaan kinerja yang optimal;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel.

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menangani permasalahan transportasi;
2. Terselenggarannya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai indikator kinerja utama (IKU) bidang transportasi;
3. Dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan laporan keuangan yang wajar, akurat, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah dengan cara:

1. Tersedianya regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;
2. Terciptanya pelayanan sistem transportasi yang visioner dan kompatible;
3. Tersedianya prasarana dan fasilitas transportasi yang memadai;
4. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;

Dengan sasaran:

1. Menyusun regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;
2. Menciptakan kemudahan penggunaan integrasi antarmoda transportasi;
3. Penggunan teknologi digital dan ramah lingkungan;
4. Menyediakan prasarana dan fasilitas transportasi sesuai kebutuhan;
5. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
6. Penanganan kemacetan lalu lintas di wilayah Provinsi Banten;
7. Mengendalikan angkutan orang/barang di wilayah Provinsi Banten.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan kelembagaan DinasPerhubungan yang berakhlakulkarimah dengan efektif, efisien,transparan dan akuntabel sertaaparatur yang berintegritas dalam melayani masyarakat	MeningkatnyaPenyelenggaraan Pemerintahan yangAkuntabel, Efektif, danefisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	A	A	A
2	Meningkatnya membangungan dan penataan infrastruktur transportasi yang terpadu danberkelanjutan untuk mendukungkonektivitas antar wilayah	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalulintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	10	20	0	0	0
			Persentase peningkatan Pelayanan Perhubungandarat, laut dan udara (%)	0	0	100	100	100
		Meningkatnya Kinerjapelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi (%)	10	20	20	20	20

Sumber Renstra Perubahan Dishub 2017-2022

2.3. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

2.3.1. ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Menengah RPJMD 2017-2022. StrategiRPJMD 2017-2022 pada **Misi-1 "Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat"** dengan arah kebijakan RPJMD 2017-2022 **"Misi-1 "Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan".**

Sedangkan strategi **RPJMD 2017-2022 Misi-2 :**

1. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah;
2. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi;
3. Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan;
4. Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi;
5. Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana transportasi.

Arah kebijakan RPJMD 2017-2022 Misi-2:

1. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang PerkonomianDaerah;
2. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi;
3. Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan;
4. Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi;
5. Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana transportasi.

2.3.2. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Sebagaimana tabel 2.2. strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan adalah Peningkatan pelayanan publik yang melayanilangsung kepada masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, serta mendetailkannya padastandar

operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, diupayakan ditempuh dengan beberapa cara berikut:

1. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menangani permasalahan transportasi dengan meningkatkan kualitasaparatur dengan mengikuti Diklat Teknis maupun Diklat non Teknis juga.
2. Terselenggarannya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai indikator kinerja utama (IKU) dan melaksanakan program/kegiatan sesuai perencanaan waktu dan target yang ditentukan.
3. Dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan laporan keuangan yang wajar, akurat, danakuntabel dengan melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program /kegiatan baik fisik maupun keuangansecara periodik dan terpadu.
4. Menyusun regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi. Dengan menerbitkan peraturan-peraturan pemerintahdaerah yang mendukung kelancaran pelakasanaan program dan kegiatan.
5. Manajemen Lalu lintas

   Perkembangan lalu lintas di Provinsi Banten terus meningkat dengan cepat, tidak memungkinkan terakomodir oleh pertumbuhanpembangunan jalan-jalan baru. Untuk itu perlu diterapkan langkahlangkahmanajemen lalu lintas untuk memanfaatkan prasarana jalanyang ada secara optimal. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaandan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan optimasipenggunaan prasarana yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalulintas dan sarana penunjangnya. Langkah-langkah yang dapatdilakukan dalam manajeman lalu lintas antara lain:

   1) Manajemen Lalu lintas
   2) Manajemen kapasitas

3) Manajemen permintaan (demand)

4) Manajemen prioritas

6. Manajemen Angkutan Umum Arah kebijakan angkutan umum di wilayah Provinsi Banten adalah:

1) Pengembangan sistem angkutan umum massal

2) Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum

3) Pengaturan dan perijinan pengusaha, pemerintah akanmenyiapkan perusahaan milik pemerintah untuk swastanisasi;

4) Penyediaan terminal penumpang berbasis Transit OrientedDevelopment (TOD);

5) Membuat lajur khusus bus pada beberapa ruas jalan baik searahmaupun berlawanan arah dengan arus lalu lintas (contra flow);

6) Memberikan jalur khusus angkutan umum untuk melalui suatu kawasan/ruas jalan tertentu di mana kendaraan pribadi dilaranguntuk memasukinya.

7. Manajemen Angkutan Barang

8. Manajemen Terminal

9. Manajemen Tata Ruang

10. Penyebaran pusat kegiatan

11. Manajemen Lingkungan

12. Manajemen Sumber Daya Manusia

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dapat dilihatpada tabel

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.1	Mewujudkan kelembagaanDinas Perhubunganyangberakhlakul karimahdengan efektif, efisien,transparan dan akuntabelserta aparatur yangberintegritas dalam melayanimasyarakat	1.1.1	MeningkatnyaPenyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,Efektif, danefisien	1.01	Peningkatan pelayananpublik yangmelayanilangsung kepadamasyarakat	1.01	Peningkatan pelayanan publik dan kinerjaaparatur, sertamendetailkannya padastandar operasional danprosedur(SOP) pelayanan
1.2	Meningkatnya pembangungan dan penataan infrastruktur transportasi yang terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung konektivitas antar wilayah	2.1.7	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas	2.14	Penataan / Rekayasa Lalu lalulintas angkutan Jalan Pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan	2.14	Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana Prasarana Lalulintas
		2.1.8	Meningkatnya Kinerjapelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	2.15	Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kelengkapan Lalulintas pada Jaringan Jalan	2.15	Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelengkapan Lalulintas pada Jaringan Jalan
				2.16	Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Transportas	2.16	Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana Prasarana transportasi
				2.17	Meningkatkan Kinerja Pelayanan melalui Penyediaan Sarana danPrasaranaTransportasi	2.17	Memenuhi kebutuhan saranan danprasarana transportasi

2.4. PRIORITAS DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

Secara geografis wilayah Provinsi Banten terletak pada 105˚1'11'' BT hingga 106˚7'12" BT dan 5˚7'50" LS hingga 7˚1'1" LS yang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan Laut Jawa
2. Sebelah timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.
3. Sebelah selatan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah barat dengan Selat Sunda

Provinsi Banten yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa, memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak saja berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan terdapat potensi yang berskala internasional. Beberapa potensi unggulan nasional berada di Wilayah Provinsi Banten antara lain sektor pariwisata, industri dan pertambangan yang tersebar dibeberapa kawasan. Selanjutnya, kedudukan dan peran wilayah Provinsi Banten dalam konstelasi nasional atau sistem perwilayahan nasional adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Banten yang berada di bagian barat Pulau Jawa menjadi penghubung antara sistem Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Melalui posisi seperti ini Banten menjadi pintu yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya. Dampak yang terjadi dalam wilayah Banten akan mempunyai implikasi secara luas pada kondisi keseluruhan sistem yang terkait. Khususnya dalam sektor transportasi misalnya, keberadaan Pelabuhan Merak menjadi penentu roda perekonomian yang bergerak dari dan ke Pulau Sumatera. Demikian juga dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta merupakan cermin dari karakter nasional, sebab menjadi pintu gerbang ke dunia luar;
2. Keterkaitan dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (BPTJ) mempunyai dampak berganda berupa pengaruh ke depan maupun ke belakang. Pengaruh ke depan dapat dilihat pada aktivitas hilir apa saja yang muncul

pada wilayah-wilayah tersebut sebagai akibat dari produksi yang dilakukan di Banten. Pengaruh ke belakang adalah aktivitas hulu yang muncul untuk menunjang produksi yang dilakukan di Banten. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari proses peluberan karena adanya aglomerasi perkotaan, khususnya yang digerakkan oleh Jakarta sebagai ibukota negara. Contoh yang dapat dikemukakan adalah pertumbuhan kawasan perkotaan di perbatasan dengan DKI Jakarta. Dalam hal ini, Banten menyumbangkan faktor produksi lahan dan tenaga kerja sebagai komponen penggerak pertumbuhan wilayah;

3. Keterkaitan dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII. BPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan tranportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A. Provinsi Banten berada wilayah kerja BPTD Wil. VIII.
4. Keberadaan jalur lalu lintas internasional Selat Sunda (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Selat Sunda menjadi strategis bagi pertahanan dan kemananan nasional karena menjadi salah satu jalur perlintasan internasional Samudera Hindia - Laut Cina Selatan;
5. Provinsi Banten memiliki kawasan perairan yang panjang pantainya lebih kurang 517 kilometer, terbentang dari Pantai Utara Laut Jawa berbatasan dengan DKI Jakarta sampai dengan Perairan Pantai Selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan potensi panjang pantainya itu Provinsi Banten membangun banyak pelabuhan di wilayahnya. Diantara pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh Provinsi Banten adalah :
   a) Pelabuhan Umum, melayani kepentingan umum, terdiri dari : Pelabuhan Banten, Pelabuhan Cigading, Pelabuhan Karangantu, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan

Anyer, Pelabuhan Labuan, Pelabuhan Muara Binuangeun, Pelabuhan Kronjo dan Pelabuhan Muara Dadap;

b) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu terdapat di DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama Banten;

c) Terminal Khusus, yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang, Serang, pandeglang dan Lebak;

d) Pelabuhan Penyeberangan Merak, yang melayani angkutan penyeberangan lintas Merak (P. Jawa) – Bakauheni (P. Sumatera) terdapat di Kota Cilegon.

Berdasarkan potensi aktifitas tersebut diatas, menunjukkan bahwa aktifitas pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Banten sangat tinggi baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal maupun sebagai pintu masuk (transit) lalu lintas barang skala nasional. Sehingga dibutuhkan pelabuhan yang mampu menampung aktifitas bongkar muat barang, peti kemas dan container dengan skala yang lebih besar. Bahkan diperlukanpengembangan pelahuban pengumpan regional dalam rangka mendukung logistik dan pariwisata.

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung untuk meningkatkan sektor pariwisata didukung dengan pembangunan Bandara Banten Selatan dan Pelabuhan Panimbang sebagai sarana memperlancar transportasi baik bongkar muat barang maupun penumpang. Sehingga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun Banten secara keseluruhan.

7. Seiring dengan laju pergerakan orang dan barang baik dalam wilayah Provinsi Banten maupun keluar-masuk wilayah Provinsi Banten sangat tinggi dibutuhkan integrasi sarana transportasi berbasis jalan maupun berbasis rel. Untuk memberikan pelayanan

transportasi yang berkeselamatan perlu dilakukan penataan-penataan baik regulasi dan sarana prasarana yang salah satu diantaranya mengakatifkan kembali (reaktivasi) dan revitalisasi sarana transportasi terutama berbasis rel yang keberadaannya tidak aktif. Adapun jalur kereta api yang tidak aktif adalah lintas Rangkasbitung-Labuan, Cilegon-Anyer Kidul dan Saketi – Bayah. Untuk itu, perbaikan dan revitalisasi kereta api harus masuk dalam skala prioritas (dalam bentuk kegiatan langsung atau kegiatan pendukung), karena sistem transportasi kereta api terkait langsung dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Hingga saat ini kereta api masih menjadi salah satu moda andalan rakyat. Revitalisasi kereta api dirasakan cukup mendesak, karena moda ini dinilai paling banyak bersentuhan dengan publik. Selain itu telah dilakukan kajian pembangunan jalur kereta api lintas utara. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mewujudkan hak masyarakat terhadap perbaikan sistem perkeretaapian agar masyarakat dapat lebih terjamin dari keselamatan, keamanan dan tercapai standar kenyamanan.

8. Sebagai kelengkapan keselamatan transportasi jalan diperlukan dukungan sarana kelengkapan jalan seperti : lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), rambu-rambu, guard rail, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan lain sebagainya. Hal ini dalam upaya mewujudkan rasa nyaman, aman dan selamat kepada masyarakat transportasi.

2.5. Program dan Kegiatan

Sistem Jaringan Transportasi (sistem dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kereta api dll), dan Sistem Pengaturan Kegiatan (sistem yang mengatur kewenangan masing-masing instansi dan stakeholder baik provinsi, kabupaten/kota maupun masyarakat). Melalui pendekatan ini diharapkan akan terwujud pemerataan hasil pembangunan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan sektor ekonomi dan stabilitas daerah. Dengan penyebaran jaringan prasarana secara merata, maka sedikit banyak akan mengurangi biaya produksi

(transport), biaya keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan dari masalah transportasi, sehingga diharapkan mempercepat pertumbuhan kegiatan sektor-sektor ekonomi daerah.

Oleh karena itu strategi ini difokuskan pada : (1) Pengembangan wilayah strategis berupa aksessibilitas jaringan transportasi barang dan orang dalam memperlancar aksessibilitas dari dan ke Kawasan Bandara Soekarno-Hatta (PINTU 1) disamping pengembangan kawasan itu sendiri dalam menciptakan daya tarik bagi pertumbuhan kawasan disekitarnya; (2) Pengembangan aksessibilitas jaringan transportasi barang dan dukungan penyediaan infrastruktur dasar penunjang pelabuhan (listrik, jalan dan air) dalam operasional Pelabuhan Merak (PINTU 2) dan dukungan kepada pembangunan Pelabuhan Bojonegara yang diharapkan menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dengan orientasi pembangunan infrastruktur wilayah; dan (3) Pengembangan wilayah produktif berupa aksessibilitas jaringan transportasi rakyat dan usaha agro untuk memperlancar sistem distribusi dan produksi agro melalui Pengembangan Stasiun Kereta Api Rangkasbitung (PINTU 3). Disamping itu dalam menunjang pengembangan kawasan pada masing – masing pintu tersebut, perlu diperhatikan keterkaitan serta tipologi kawasan – kawasan sekitar 3 (tiga) pintu tersebut yang mengacu pada struktur dan karateristik ruang yang ada. Pada dasarnya tujuan revitalisasi kawasan dan wilayah ini adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan, tentunya sesuai dengan strategi pegembangan wilayah di Provinsi Banten yakni sesuai dengan potensi dan permasalahan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) melalui penciptaan keterkaitan dan keterhubungan yang positif baik dari aspek ekonomi, sosial, infrastuktur, maupun spasial (ruang), melalui pelaksanaan program-program khusus yang diarahkan pada masing-masing kawasan secara terpadu dan lintas sektoral. Untuk itu, kawasan-kawasan tertinggal diarahkan agar dapat mengoptimalkan potensi internalnya

dengan cara memanfaatkan keterhubungannya dengan kawasan-kawasan yang lebih maju disekitarnya.

2.5.1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2019 adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Dinas Perhubungan yang berorientasi pada good government (pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih). Pemangku program ini adalah Sekretariat dan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Darat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan, Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan. Dengan capaian program yaitu

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan.

2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Program tersebut dalam rangka mendukung peningkatan kualitas perencanaan pengembangan transportasi darat, laut, udara, perkertaapian, pelayanan keselamatan transportasi darat dengan pemangku program bidang lalu lintas, dengan pemangku program bidang pengembangan transportasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Prasarana Transportasi, Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan, sarana dan prasarana transportasi darat, angkutan serta kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi. Dengan capaian program melalui kegiatan-kegiatan tersebut diatas dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan transportasi.

3. **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**

Program tersebut dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana perkretaapian dengan pemangku program bidang angkutan, Teknik sarana dan prasarana, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api serta kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang. Dengan capaian program melalui kegiatan-kegiatan tersebut diatas dalam upaya mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, angkutan serta perkretaapian.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Program tersebut dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi laut dan udara dengan pemangku program bidang perhubungan laut dan udara, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan serta Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut. Dengan capaian program melalui kegiatan-kegiatan tersebut diatas dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi laut dan udara.

2.5.2. KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang/jasa dan modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa dengan ricincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
10. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

11. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
12. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
13. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
14. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
15. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
16. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
17. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
18. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai upaya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana starategis, telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas yang merupakan target lembaga yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD;
2. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas
3. Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara
4. Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportsi

2.7. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada dokumen perencanaan terdapat perjanjian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, perjanjian kinerja ini berjenjang mulai dari Kepala Dinas sampai dengan pejabat Eselon IV.

Untuk lebih jelas mengenai capain kinerja dapat di lihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Prosentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Nilai	100,00
2	Meningkatnya kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Presentase kebutuhan sarana dan prasarana	%	20,00
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	%	85,00

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Sekretaris

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitassumberdaya Aparatur yang mendukungkelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Transportasi

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perencanaan Transportasi yang diterapkan	%	50

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana Transportasi	%	30,77
		Prosentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	%	10
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	%	15

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Jalan	%	15
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	%	20
		Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan	%	100

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Kepala Bidang Perhubungan laut dan Udara

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	%	100
		Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	%	100

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Kepala UPTD. Pengelolaan Prasarana Perhubungan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	%	10
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional	%	100

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 2. Tunjangan kinerja	bulan	14 12
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terkoordinasinya dan Terlaksanya Akuntansi SKPD	Dokumen	2
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkoordinasinya dan Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	12
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terkelolanya dan Tersiapnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunya Laporan Keuangan Bulan/Triwulanana/Semesteran SKPD	Dokumen	1
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.10. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Forum Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	2
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunya Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunya Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasi dan TersusunyaLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	6
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersususunya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan	1
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kegiatan	1
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksanannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kegiatan	1
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Bulan	12
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Tahun	1
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12
12	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Aset Tetap Lainnya	Paket	1
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukuwng Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	13
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Bulan	12
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12
18	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud	Bulan	12
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun	1
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.Pengelolaan Prasarana Perhubungan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kegiatan	1
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan	1
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paket	1
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainny	Kegiatan	1
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Kasi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Kasi Pengembangan Prasarana Transportasi

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	2

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Kasi Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Kasi Angkutan Barang Perkeretaapian dan Multimoda

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Revitalisasi Alat Palang Pintu Perlintasan dari Manual menjadi Semi Otomatis	Unit	3

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Kasi Angkutan Penumpang

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum AKDP	Trayek	10
		Tersedianya Perlengkapan Pendukung Operasional Bus Sekolah/Wisata	Unit	2

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Kasi Teknik Sarana dan Prasarana

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya Pembangunan Halte	Unit	5
		Terlaksananya Kegiatan DED JPO pada ruas Jalan Syech Nawawi Albantani dan DED Halte di Jalan Provinsi	Dokumen	2
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang	Dokumen	2
		Terlaksananya Pembangunan Pos Perlintasan Sebidang Kereta Api di Wilayah Provinsi Banten	Lokasi	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Kasi Bina Keselamatan Transportasi Darat

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan	Terlaksananya Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	kegiatan	1
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum	kegiatan	1
		Terlaksananya Seleksi Pengemudi Teladan	kegiatan	1
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ	%	100
		Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Jalan	Kegiatan	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Kasi Manajememen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	**5**
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Fasilitasi dan Evaluasi Andalalin laksananya Kegiatan Penanganan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan di Jalan Provinsi	kegiatan	1
2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan Armature LPJU (E-Kataloge) Smart Sistem 120 Watt LED	Buah	430
		Pengadaan dan Pemasangan LPJU/APJ (Mekanikal dan Elektrikal) (Listrik PLN)	Unit	217
		Pengadaan dan Pemasangan LPJU/APJ (Mekanikal dan Elektrikal) (Listrik PLN) Stang Ornamen	Unit	33
		Pengadaan dan Pemasangan Marka Zebra Corss	Lokasi	48
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	Unit	384
		Pengadaan dan Pemasangan RPPJ/RPPJ Kata - Kata	Unit	6
		Pengadaan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variable Message Sign)	Unit	1
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kegiatan	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Kasi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	%	100

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.22. Capaian Kinerja Kasi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Terlakasanaya Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut	Kegiatan	1
		Terlaksanaya Pembinaan Keselamatan Pelayaran	Dokumen	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Kasi Kepelabuhan dan ASDP

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kegiatan	2
		Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Kepelabuhanan	Kegiatan	2
2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya pengendalian Peneyelenggaraan kegiatan pelabuhanan	Dokumen	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Kasi Perhubungan Udara

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengawsan Terhadap Kawasan selamatan Operasi Penerbangan	Dokumen	1

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Kasi Prasarana perhubungan laut dan perhubungan udara UPTD UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunya dan Penerbitan Izin Pelabuhan Pengumpan Regiona	%	100

Sumber perkin perubahan 2021

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Kasi Sarana Perhubungan Darat dan Operasional Angkutan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Angkutan	%	100

Sumber perkin perubahan 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada Untuk lebih jelah dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan dibawah ini

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Eselon II) dalam Perjanjian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)					
1	Mewujudkan kelembagaan Dinas Perhubungan yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta aparatur yang berintegritas dalam melayani masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	A	A
Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur					
2	Meningkatnya pembangungan dan penataan infrastruktur transportasi yang terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalulintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	0	
			Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara (%)	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi
		Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi (%)	20	20

Sumber Renstra Perhubahan 2017-2022

A. PENGHITUNGAN CAPAIAN CAKIP

Capaian SAKIP OPD merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien". Indikator kinerja ini menggambarkan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. IKU ini merupakan IKU wajib bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis utama perangkat daerah sesuai TUPOKSI dan target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Aktualisasi dan implementasi dari IKU ini adalah program dan kegiatan di unit kerja Sekretariat/Bagian Tata Usaha Perangkat Daerah. Pengukuran realisasi target dari indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan Definisi Operasional (DO) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan persamaan sebagai berikut, yaitu:

Tabel 3.2. Definisi operasional dan Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Capaian SAKIP OPD

NO	KOMPONEN	BOBOT	SUBKOMPONEN
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, implementasi

NO	KOMPONEN	BOBOT	SUBKOMPONEN
			pengukuran
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, pemanfaatan informasi kinerja dalam bentuk laporan
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan evaluasi, kulaitas evaluasi, pemanfaatan hasil evaluasi
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja yang dilaporkan, output dan outcome dan kinerja lainya
	Total	100	

Sumber: Renstra Dishub 2017-2022

Dengan hasil tersebut target kinerja Dinas Perhubungan tahun 2021 adalah A dengan nilai 85 dengan adanya nilai tersebut Dinas Perhubungan berencana untuk mememenuhi target tersebut mengingat pada tahun 2020 Dinas Perhubungan mendapat nilai 76,73 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3. Rincian Penilaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020

NO	KOMPONEN	PRESENTASE	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	82,65	24,79
2	Pengukuran Kinerja	81,25	20,31
3	Pelaporan Kinerja	67,68	10,15
4	Evaluasi Internal	62,25	6,23
	Capaian Nilai SAKIP	61,48	
	Capaian Kinerja (20%)	76,25	15,25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	76,73

Sumber: Penilaian dan monitoring inspektorat 2020

B. PENGHITUNGAN PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT, LAUT DAN UDARA

Sebagai upaya pemenuhan pelayanan perhubungan meliputi kebijakan, perencanaan, pengendalian dan pengelolaan untuk mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien. Dengan rumusan penghitungan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma\ Pelayanan\ \ (Kebijakan\ ,Perencanaan\ ,Pengendalian\ \ dan\ Pengelolaan\ )\ Perhubungan\ \ yang\ \ terpenuhi}{\Sigma\ Pelayanan\ \ (Kebijakan\ ,Perencanaan\ ,Pengendalian\ \ dan\ Pengelolaan\ )\ Perhubungan\ \ yang\ \ targetkan}\ \text{x}\ 100\%$$

$= \frac{100}{100}$ x 100%

= 100%

Berdasarkan perhitungan didapat nilai 100% presentase untuk capaian peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara.

C. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN, PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG LEBIH BAIK

Sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran transportasi dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan rumusan penghitungan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma\ sarana\ \ dan\ \ prasarana\ \ \ yang\ \ tersedia}{\Sigma\ sarana\ \ dan\ \ prasarana\ \ \ yang\ \ dibutuhkan}\ \text{x}\ 100\%$$

$= \frac{20}{20}$ X 100%

= 100 %

program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada Untuk lebih jelah dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan dibawah ini

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Program

NO.	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA 2017-2022 Perubahan	
		TARGET 2021 (%)	REALISASI 2021 (%)
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian	100,00	97,62

NO.	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA 2017-2022 Perubahan	
		TARGET 2021 (%)	REALISASI 2021 (%)
1	2	3	4
	dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)		
2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100,00	98,00
3	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %) (UPTD)	100,00	70,00
4	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100,00	100,00
5	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan:%)	100,00	100,00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		
6	Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan (Satuan:%)	100,00	100,00
7	Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (Satuan:%)	20,00	20,00
8	Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Jalan (Satuan : %)	15,00	15,00
9	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana Transportasi (Satuan : %)	30,77	30,77
10	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Sarana Transportasi Darat (Satuan : %)	20,00	19,97
11	Persentase Perencanaan Transportasi yang diterapkan (Satuan : %)	50,00	50,00
12	Prosentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (Satuan : %)	10,00	10,00
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		
13	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Satuan :%)	100	87,77
14	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (Satuan : %)	100	100
15	Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan : %)	100	100
16	Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan : %) (UPTD)	100	85,53
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**		
17	ersentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (Satuan : %)	15	15

Sumber: Hasil Analisis

3.2. CAPIAN KINERJA KELUARAN (OUT PUT)

Dinas Perhubungan sesuai dengan target dan realisasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya berikut ini.

Tabel 3.5. Target Output dan Realisasi Kegiatan Dinas Perhubungan TA. 2021

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran	Target Keluaran	Realisasi Keluaran
1	2	3	4	5
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (INDUK)**			
2.15.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
2.15.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
2.15.1.101.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renja 2. Dokumen Renstra	2 dokumen	2 dokumen
2.15.1.101.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen
2.15.1.101.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen
2.15.1.101.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen
2.15.1.101.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA-P	1 Dokumen	1 Dokumen
2.15.1.101.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokuemen laporan capaian kinerja	3 dokumen	4 dokumen
2.15.1.101.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan evaluasi	6 dokumen	6 dokumen
2.15.1.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
2.15.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	14 bulan
2.15.1.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tambahan penghasilan ASN	12 bulan	12 bulan
2.15.1.1.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan hasil koordinasi pelaksanaan akutansi	1 dokumen	1 dokumen

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran	Target Keluaran	Realisasi Keluaran
1	2	3	4	5
2.15.1.1.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laoran keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen
2.15.1.1.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen
2.15.1.1.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen keuangan bulanan/triwulanan/semster	7 dokumen	7 dokumen
2.15.1.1.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen pragnosis	1 dokumen	1 dokumen
2.15.1.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			
2.15.1.1.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rincian kebutuhan pengadaan sarana dan prasara kantor	1 dokumen	1 dokumen
2.15.1.1.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rincian kebutuhan pengadaan sarana dan prasara kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2.15.1.1.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rincian kebutuhan pengadaan sarana dan prasara kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2.15.1.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			
2.15.1.1.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pelaksanaan Diklat ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2.15.1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Kerja Lapangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2.15.1.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran	Target Keluaran	Realisasi Keluaran
1	2	3	4	5
2.15.1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adimintrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan
2.15.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adimintrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1 Tahun
2.15.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adimintrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1 Tahun
2.15.1.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Adimintrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1 Tahun
2.15.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adimintrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan
2.15.1.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adimintrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan
2.15.1.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
2.15.1.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Kantor	1 paket	1 paket
2.15.1.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Aset Kantor	1 paket	1 paket
2.15.1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
2.15.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Pegawai Non ASN	13 Bulan	13 Bulan
2.15.1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran	Target Keluaran	Realisasi Keluaran
1	2	3	4	5
2.15.1.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan pendukung sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	1 Tahun
2.15.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan pendukung sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
2.15.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan pendukung sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
'2.15.1.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan pendukung sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	1 Bulan
'2.15.1.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan pendukung sarana dan prasarana perkantoran	1 Tahun	1 Paket
2.15.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan pendukung sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
'2.15.1.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan pendukung sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	1 Paket
'2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			
'2.15.02.1.01.	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**			
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen perencanaan transportasi yang di terapkan	3 dokumen	3 dokumen

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran	Target Keluaran	Realisasi Keluaran
1	2	3	4	5
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**			
2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	1. Terlaksananya pembangunan halte 2. Terlaksanaya kegiatan DED JPO dan DD halte 3. Terlaksananya pemeliharaan keselamatan perlintasan sebidang	100%	100%
2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**			
2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan perlengkapan jaringan jalan	100%	100%
2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemsangan fasilitas perlengkapan jalan	100%	100%
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksanaya Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan dan perlengkapan jaringan jalan	100%	100%
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pemsangan fasilitas perlengkapan jalan	100%	100%
'2.15.02.1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**			
'2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Penyelenggaraan Keselamatan lalulintas	12 bulan	0

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran	Target Keluaran	Realisasi Keluaran
1	2	3	4	5
'2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Keselamatan lalulintas	12 bulan	2 bulan
'2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Keselamatan lalulintas	12 bulan	12 bulan
'2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			
'2.15.02.1.08.01	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Pengawasan dan penyelenggaraan angkutan umum AKDP	100%	100%
'2.15.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			
'2.15.03.01	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**			
'2.15.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	12 Bulan	12 Bulan
'2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1. Pemantauan dan pengendalian angkutan laut 2. Pembinaan keselamatan pelayaran	12 bulan	12 bulan
'2.15.03.1.08	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**			

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran	Target Keluaran	Realisasi Keluaran
1	2	3	4	5
'2.15.03.1.08.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya pengendalian, Penertiban dan pengawasan keselamatan pelayaran	4 Bulan	4 Bulan
'2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**			
'2.15.03.1.09.01	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Bulan	12 Bulan
'2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**			
'2.15.05.1.06	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**			
'2.15.05.1.06.01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Rencana induk perkerataapian	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN UPTD				
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
2.15.1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	12 Bulan	12 Bulan
2.15.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	1 kegiatan	1 kegiatan

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran	Target Keluaran	Realisasi Keluaran
1	2	3	4	5
2.15.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	1 kegiatan	1 kegiatan
2.15.1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
2.15.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	12 Bulan	12 Bulan
2.15.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	1 kegiatan	1 kegiatan
2.15.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	1 kegiatan	1 kegiatan
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			
2.15.02.10.3	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			
2.15.02.10.3.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Retribusi (SK Trayek dan kartu pengawasan)	800 KP	400 KP
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			
2.15.03.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**			
2.15.03.09.01	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kordinasi dan monitoring kegiatan pelabuhan pengumpan	1 kegiatan	1 kegiatan

Sumber: Hasil Analisis

Adapun secara terperinci permasalahan dan solusi permasalahan dalam pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun 2021 dapt dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021, Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
		Dinas Perhubungan									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	**100**	**97,62**	**97,62**	**Rad-grk Tidak Diselenggarakan Terkait Pandemi Covid-19**	**Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Kondisi Dan Anggaran Yang Tersedia**	
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	**100**	**98**	**98,00**	**Memperhatikan Urgensi, Pemeliharaan Aset Tidak Terwujud Tidak Diselenggarakan Terkait Pandemi Covid-19**	**Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Kondisi Dan Anggaran Yang Tersedia**	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	**100**	**70,70**	**70,70**	**Belanja Pendukung Sppd Tidak Direalisasikan Secara Maksimal Terkait Adanya Pandemi Covid 19**	**Surat Edaran New Normal**	
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	**100**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	**100**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tersusunnya Dokumen Forum Organisasi Perangkat Daerah (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	Pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara semi virtual, belanja pendukung SPPD tidak maksimal dapat dibelanjakan	koordinasi dengan stackholder dan mitra perhubungan, Rasionalisasikan perencanan anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
					Terkoordinasi dan Tersusunya Dokumen RKA-SKPD (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	Penyusunan mengalami keterlambatan mengikuti jadwal dari TAPD Provinsi Banten	Koordinasi dengan Tim TAPD Provinsi Banten	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD							
					Terkoordinasi dan Tersusunya Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	Penyusunan mengalami keterlambatan mengikuti jadwal dari TAPD Provinsi Banten	Koordinasi dengan Tim TAPD Provinsi Banten	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
					Terkoordinasi dan Tersusunya Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	Penyusunan mengalami keterlambatan mengikuti jadwal dari TAPD Provinsi	Koordinasi dengan Tim TAPD Provinsi Banten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Banten		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							
					Terkoordinasi dan Tersusunya Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	Penyusunan mengalami keterlambatan mengikuti jadwal dari TAPD Provinsi Banten	Koordinasi dengan Tim TAPD Provinsi Banten	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Terkoordinasi dan TersusunyaLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : dokumen)	*4*	4,00	100,00	Beberapa kegiatan belum masuk ke dalam DPA (inovasi daerah, pengelolaan website / PPID, Daftar Penilaian Resiko (DPR), penyusunan proses bisnis,	Rasionalisasikan perencanan kegiatan dan anggaran	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Terevaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : dokumen)	*6*	5,00	83,33	1. belanja pendukung SPPD tidak maksimal dapat dibelanjakan; 2. RAD- GRK tidak diselenggarakan terkait pandemi	1. Rasionalisasikan perencanan anggaran keuangan; 2. Koordinasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									covid-19	dengan Bappeda dan Dishub Kab/Kota terkait kebutuhan data untuk RAD-GRK	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : bulan)	*14*	14,00	100,00	gaji dan tunjangan belum mencukupi s.d akhir tahun anggaran (gaji 14 bulan dan tukin 12 bulan	penambahan anggaran oleh tim TPAD	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
					Tersedianya tambahan penghasilan dan honor ASN (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	tidak ada masalah	tidak ada	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : dokumen)	*2*	2,00	100,00	tidak ada masalah	tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
					Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir TA. Sebelumnya (Unaudited dan Audited) (Satuan : dokumen)	*12*	12,00	100,00	tidak ada masalah	tidak ada	
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
					Tersusunnya Dokumen Laporan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	tidak ada masalah	tidak ada	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
					Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	tidak ada masalah	tidak ada	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
					Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	tidak ada masalah	tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
					Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	tidak ada permasalahan	-	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00	masih terdapat laporan terkait kerusakan asset bmd di lapangan, pju, rambu	koordinasi dengan pihak terkait mrll, kereta api dan sarana prasarana) untuk segera dilakukan pemeliharaan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat,	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00	terdapat data yang membingungkan pada aplikasi atisisbada	koordinasi dengan pihak terkait (BPKAD - Asset),	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										menyinkronkan dengan data asset BMD dinas perhubungan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
					Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00	[1] Pada target Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai tertulis 1 tahun, tapi pelaksanaan dilaksanakan perbulan, sehingga untuk output dari sub kegiatan ini tercapai [2] Triwulan I s.d III tidak dilakukan pelaksanaan kegiatan karena masih dalam	koordinasi dengan pimpinan, melakukan rasionalisasi anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	[1] pada tahun berikutnya, target akan diperbaiki [2] anggaran dirasionalisasi
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00	Realisasi serapan anggaran tidak sesuai target anggaran (rakas), dikarenakan adanya revisi pada proses administrasi terkait pembuatan kontrak dan diberlakukannya kerja WFH yang berdampak lamanya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan realisasi serapan ang	koordinasi dengan bagian terkait dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Pembayaran listrik kantor UPTD (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00	tidak ada masalah	tidak ada	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor INDUK (Satuan : bulan)	*12*	12,00	100,00	terlambatnya (beberapa bulan) pembayaran listrik dikarenakan	koordinasi dengan bagian terkait dan lakukan pelaksanaa	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									kerja wfh	n sesuai dengan aturan yang berlaku	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Penyediaan peralatan kantor UPTD (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00	tidak ada masalah	tidak ada	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan : tahun)	*1*	1,00	100,00	Pada target Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tertulis 1 tahun, tapi pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tetap dilaksanakan perbulan untuk memenuhi pelayanan kantor, sehingga untuk output dari sub kegiatan ini tercapai 100%	pada tahun berikutnya, target akan diperbaiki	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Tersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Satuan : tahun)	*1*	1,00	100,00	tidak ada permasalahan		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Terfasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan : tahun)	*1*	1,00	100,00	Pada target fasilitasi tamu tertulis 1 tahun, tapi pelaksanaan fasilitasi tamu tetap dilaksanakan perbulan atau setiap kali ada tamu, sehingga untuk output dari sub kegiatan ini tercapai 100%	pada tahun berikutnya, target akan diperbaiki	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Pelaksanaan kordinasi UPTD (Satuan : bulan)	*12*	1,00	8,33	belanja pendukung SPPD tidak maksimaldiselenggarakan terkait pandemi covid-19	Rasionalisasikan perencanan anggaran keuangan	
					Terselenggaraannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD INDUK (Satuan : bulan)	*12*	12,00	100,00	kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada situasi pandemi covid - 19	optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : bulan)	*12*	12,00	100,00	tidak ada permasalahan	dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
					Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Satuan : paket)	*1*	1,00	100,00	terhambatnya pelaksanaan kegiatan (belanja pengadaan) dikarenakan situasi pandemi covid - 19	koordinasi pimpinan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Satuan : paket)	*1*	1,00	100,00	serapan anggaran tidak sesuai jadwal anggaran kas dampak dari pademi covid 19 /WFH	koordinasi dengan bagian terkait, dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan : bulan)	*13*	13,00	100,00	tidak terdapat adanya permasalahan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tahun anggaran 2021	dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Satuan : bulan)	*12*	12,00	100,00	tidak ada kendala	pelaksanaan sesuai dengan ketentuan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan (UPTD (Satuan : paket)	*1*	1,00	100,00	tidak ada masalah	tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan INDUK (Satuan : bulan)	*12*	12,00	100,00	tidak ada kendala	tidak ada kendala	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Pemeliharaan peralatan mesin (UPTD) (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00	pelaksanaan mengalami keterlambatan	Rasionalisasikan perencanan kegiatan dan anggaran	
					Terpeliharaannya Peralatan dan Mesin Lainnya (Satuan : bulan)	*12*	12,00	100,00	target serapan anggaran sebagian tidak sesuai dengan jadwal (rakas) di karenakan kegiatan tersebut sifatnya tentatif dan adakalanya sifatnya isedentil	koordinasi dengan pimpinan, ikuti prosedur dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,	
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
					Terpeliharaannya Aset Tak Berwujud (Satuan : bulan)	*12*	0,00	0,00	pelaksanaan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi untuk penanganan	koordinasi dengan pimpinan, dan PEP	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									covid 19		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Terpeliharanya / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Satuan : tahun)	*1*	1,00	100,00	tidak terdapat permasalahan	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (UPTD) (Satuan : paket)	*1*	1,00	100,00			
					Terpeliharanya / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Satuan : paket)	*1*	1,00	100,00	terkendala pada pelaksanaan lelang sehingga target serapan anggaran tidak sesuai dengan jadwal anggaran kas	koordinasi dengan pimpinan, melaksanakan sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam capaian indikator sub kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Terpeliharanya / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Satuan : bulan)	*12*	12,00	100,00	pandemi covid 19 yang berdampak serapan anggaran tidak sesuai dengan jadwal (anggaran kas)	koordinasi dengan pimpinan, mengikuti sesuai arahan dan prosedur yang berlaku	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Ilaj)							
					Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan (Satuan : %)	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (Satuan : %)	**20**	**20,00**	**100,00**			
					Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Jalan (Satuan : %)	**15**	**15,00**	**100,00**			
					Persentase ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana Transportasi (Satuan	**30,77**	**30,77**	**100,00**	**Adanya Keterlambatan Pembangunan Dan Pembayaran**	**Optimalisasi Perencanaan Pekerjaan**	**-**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					: %)				Untuk Pengadaan Halte	Yang Akan Datang	
					Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Sarana Transportasi Darat (Satuan : %)	20	19,97	99,85	Tidak Terlaksana Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dikarnakan Mengacu Pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/1387-bkd/2021 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Baatasan Berpergian Keluar Daerah Di Lingkungan Pemerintaah Provinsi Banten	Surat Edaran New Normal	
					Persentase Perencanaan Transportasi yang diterapkan (Satuan : %)	50	50	100,00	Perhitungan Target Persentase Perencaan Transportasi Yang Deiterapkan 50% Sedangkan Capaian Indikator	Perhitungan Capaian Tersebut Didapatkan Dari Pergub Iku, Dari Jumlah Perencanaan	Sudah Tercapai Semua, Untuk Jumlah Dokumen Perencanan Transportasi Yang Diterapkan 4 Dokumen Dan Dokumentasi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Program 100%	**Transportasi Yang Diterapkan Dibagi Dokumen Perencanaan Yang Tersedia Dikalikan 100%**	**Perencanaan Yang Tersedia 4 Dokumen**
					Prosentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (Satuan : %)	**10**	**10,00**	**100,00**	**Pelaksanaan Kegiatan Berubah Tidak Sesuai Jadwal, Dikarenakan Situasi Pandemi Masih Dalam Level 3,**	**Diselenggarakan Pada Apbd-p Ta 2021 Dan Menyesuaikan Dengan Kondisi Level Ppkm.**	**-**
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi							
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi							
					Dokumen studi jaringan transportasi (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	Belum tersusunnya Rencana Induk LLAJ	Melakukan Kajian penyusunan Rencanaa Induk LLAJ tahun 2023	Tersedianya Rencana Induk LLAJ
					Dokumen studi prasarana transportasi (Satuan : dokumen)	*2*	2,00	100,00	Belum terbangunnya Prasarana Transportasi di WIlayah Provinsi	Perlu Kajian Kebutuhan Prasarana Transportasi di Wilayah	Tersedianya Dokumen Prasrana Transportasi di WIlayah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Banten	Provinsi Banten	Provinsi Banten (Terminal tipe B, JPO, Shelter dan Halte)
					Dokumen studi sarana transportasi (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	Belum tersedianya Sarana angkutan umum massal di Wilayah Provinsi Banten dan pemenuha Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Perlu Kajian Kebutuhan dan Identifikasi Sarana Tranportasi untuk sistem angkutan umum massal dan Kajian Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Terselenggaranya angkutan umum massal dan tersedianya Dokumen fasilitas keselamatan Lalu Lintas Jalan pada jalan Provinsi di WIlayah Provinsi Banten (Rambu, Guardrill, Marka, Pagar Pengaman dan Traffic Light)
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi							
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi							
					Terlaksananya Pembangunan Halte (Satuan : unit)	*5*	5,00	100,00	Terdapat Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	di lakukan pemotongan denda keterlambatan pekerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Terlaksananya Kegiatan DED JPO pada ruas Jalan Syech Nawawi Al- Bantani dan DED Halte di Jalan Provinsi (Satuan : dokumen)	*2*	2,00	100,00	tidak ada permasalahan pekerjaan	-	
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang (Satuan : dokumen)	*2*	2,00	100,00	tidak ada permasalahan pekerjaan	-	
					Terlaksananya Pembanguna Pos Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api di Wolayah Provinsi Banten (Satuan : lokasi)	*1*	1,00	100,00	tidak ada permasalahan pekerjaan	-	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi							
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi							
					Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00	untuk Perjalanan Dinas Tidak Bisa dilaksanakan Dikarenakan adanya PPKM COVID19	setelah penurunan Level PPKM Covid19 kegiatan perjalanan dinas dilakukan untuk survey/monitoring	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										atas dasar hasil rapat ANDALALIN	
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas							
					Pengadaan dan Pemasangan LPJU/APJ (Mekanikal dan Elektrikal) (Listrik PLN) (Satuan : unit)	*217*	217,00	100,00	Untuk Pengadaan dan Pemasangan LPJU/APJ (Mekanikal dan Elektrikal) Wilayah Banten Utara (Ruas Jalan Pontang-Kronjo, Kronjo-Mauk, Mauk-Teluk Naga, Teluk Naga - Dadap (200 Unit) Tidak terlaksana Sesuai jadwal Pelkasanaannya di Triwulan III dikar	Setelah Melakukan Tender ulang Pihak Pemenang Pekerjaan Langsung di arah untuk melakukan pemasangan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU/APJ (Mekanikal dan Elektrikal) Wilayah Banten Utara (Ruas Jalan Pontang-Kronjo, Kronjo-Mauk, Mau	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengadaan Armature LPJU (E-Kataloge) Smart Sistem 120 Watt LED (Satuan : buah)	*430*	430,00	100,00	untuk pelaksanaan pengadaan armature LPJU tdiak bisa dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan PPKM Covid19 dikarenakan pabrikasi /tempat produksi bertempat di luar daerah Banten	Seteloh penurunan Lvel PPKM Covid19 kami langsung melakukan kepada produsen lampu atau pengenalan produk/expose Armature LPJU yang akan d pasang d tiang LPJU pada ruas jalan Provinsi	
					Pengadaan dan Pemasangan LPJU/APJ (Mekanikal dan Elektrikal) (Listrik PLN) Stang Ornamen (Satuan : unit)	*33*	33,00	100,00	untuk pelaksanaan fisik pekerjaan sudah terpasang sesuai yang dijadwalkan tinggal menunggu pembayaran dari BPKAD	sudah melakukan pengajuan untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU/APJ (Mekanikal dan Elektrikal) (Listrik PLN) Stang Ornamen	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengadaan dan Pemasangan Marka Zebra Corss (Satuan : lokasi)	*48*	48,00	100,00	untuk pelaksanaan fisik pekerjaan sudah terpasang sesuai yang dijadwalkan tinggal menunggu pembayaran dari BPKAD	sudah melakukan pengajuan untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Zebra Corss	
					Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar (Satuan : unit)	*384*	384,00	100,00	untuk pelaksanaan fisik pekerjaan sudah terpasang sesuai yang dijadwalkan tinggal menunggu pembayaran dari BPKAD	sudah melakukan pengajuan untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	
					Pengadaan dan Pemasangan RPPJ/RPPJ Kata - Kata (Satuan : unit)	*6*	6,00	100,00	untuk pelaksanaan fisik pekerjaan sudah terpasang sesuai yang dijadwalkan tinggal menunggu pembayaran dari BPKAD	sudah melakukan pengajuan untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RPPJ/RPPJ Kata - Kata	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengadaan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variable Message Sign) (Satuan : unit)	*1*	1,00	100,00	untuk pelaksanaan fisik pekerjaan sudah terpasang sesuai yang dijadwalkan tinggal menunggu pembayaran dari BPKAD	sudah melakukan pengajuan untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variable Message Sign)	
					Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Satuan : %)	*100*	100,00	100,00	belum maksimalnya melakukan perbaikan dikarenakan kurangnya anggaran pemeliharaan	melakukan perbaikan pada pekeerjaan yang rawan kecelakaan contoh seperti LPJU TL, WL, marka jalan dan Rambu Lalu Lintas	
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi							
					Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi (Satuan : %)	*100*	63,19	63,19	banyak kegiatan yang ditunda atau tidak dilaksanakan dikarenakan pademi covid 19 dan perhitungan realisasi capaian	untuk kegiatan yang ditunda atau tidak dilaksanakan telah dibuat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									yang tidak sesuai	surat pernyataan atau dilakukan percepatan pada bulan berikutnya	
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi							
					Terlakasananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Satuan : kegiatan)	*1*	0,00	0,00	SK Forum Tahun 2018 kadaluarsa belum di perbarui	sudah berkoordinasi dengan biro hukum tentang pembaharuan SK GUB yang sudah mati masa berlakunya	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor							
					Terlaksananya Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Satuan : kegiatan)	*1*	0,00	0,00	Refocusing anggaran	Anggaran di refocusing	
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum dan terlaksananya seleksi pengemudi teladan (Satuan : kegiatan)	*1*	0,00	0,00	Persiapan sudah dilaksanakan tetapi karena meningkatnya pandemi covid yg meningkat dan kegiatan mengumpulkan orang banyak sehingga dibatalkan sesuai dengan surat edaran kementrian Perhubungan No.AJ.506/01/01/AJ/VI/2021 tentang Pemberitahuan Peniadaan Ke	Kegiatan dibatalkan	
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum							
					Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Jalan dan Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi							
					Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan PenataanJaringan Trayek Angkutan Umum AKDP (Satuan : trayek)	*10*	10,00	100,00	Terdapat Sisa Anggaran Biaya yang tidak terserap, hal tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah anggota yang dilibatkan, mengacu pada DOMLAK terkait pertanggung jawaban pekerjaan (SPJ)	Akan dirasionalisasi sesuai DOMLAK pada tahun 2022	
					Tersedianya Perlengkapan Pendukung Operasional Bus Sekolah / Wisata (Satuan : unit)	*2*	2,00	100,00	Ada beberapa kegiatan yang tidak terserap, hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi covid 19 yang belum usai	akan di formulasi ulang di tahun 2022	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
					Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Angkutan (Satuan : %)	*100*	100,00	100,00	Belanja pendukung SPPD tidak maksimal dapat dibelanjakan dikarnakan terkait pendemi covid 19	Rasionalisasikan Perencanaan Anggaran Keuangan	
				Program Pengelolaan Pelayaran							
					Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Satuan : %)	**100,00**	**87,77**	**87,77**	**Tidak Terlaksana Kegiatan Pembinaan Keselamatan Pelayaran Dikarenakan Mengacu Pada Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1387-bkd/2021 Tnggal 21 Juni 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan**	**Tetap Melaksanakan Koordinasi Dengan Pihak - Pihak Terkait**	**Tidak Ada Permasalahan**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Bepergian Keluar Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten		
					Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Tidak Terlaksana Kegiatan Pembinaan Keselamatan Pelayaran Dikarenakan Mengacu Pada Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1387-bkd/2021 Tnggal 21 Juni 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Bepergian Keluar Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten	Tidak Ada Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan
					Persentase Pengelolaan Pelabuhan	100,00	100,00	100,00	Tidak Terlaksana Kegiatan	Menunggu Surat Edaran	Tidak Ada Permasalahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengumpan Regional (Satuan : %)				**Perjalanan Dinas Dalam Kota Dikarenakan Pemberlakuan Ppkm**	**New Normal**	
					Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan : %)	**100,00**	**88,53**	**88,53**	**Tidak Terlaksana Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dikrnakan Perberlakuan Ppkm**	**Menunggu Surat Edaran New Normal**	
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi							
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
					Terlaksananya Pengawasan Terhadap KKOP (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	Tidak Terlaksana secara maksimal Kegiatan Perjalanan Dinas Dikarnakan Mengacu Pada Surat Edaran Gubernur Nomor :	Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai arahan pimpinan	tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									800/1387-bkd/2021 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Berpergian Keluar Daerah	diluar jadwal WFO	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi							
					Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut (Satuan : kegiatan)	*1*	1,00	100,00	-	-	-
					Terlaksananya Pembinaan keselamatan Pelayaran (Satuan : dokumen)	*1*	0,00	0,00	Tidak di laksanakan karena mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/1387-BKD/2021 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Berpergian	Tetap Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Keluar Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		
				Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional							
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional							
					Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Kepelabuhanan (Jasa Konsultasi Studi Potensi Pembangunan di 2 lokasi) (Satuan : kegiatan)	*2*	2,00	100,00	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	Tindak Ada Tindak Lanjut
					Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan : kegiatan)	*2*	0,00	0,00			
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							
					Terselenggaranya pengendalian penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan (Satuan : dokumen)	*1*	1,00	100,00	SPPD tidak dilaksanakan karena mengacu pada SE Gubernur No. 800/1387-BKD/2021 tanggal 21 Juni 2021 ttg Penyesuaian Sistem kerja ASN dan Batasan Bepergian Keluar Daerah dilingkungan Pemprov Banten	Koordinasi dengan pihak terkait	tidak ada
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional							
					Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan pengumpan regional (Satuan : %)	*100*	100,00	100,00	PPR Provinsi Banten yaitu, Pelabuhan Karangantu, Anyer lor, Labuan, Namun Saat ini Pengoperasiannya belum diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan tahun ini tidak ada Pembangunan	Perlu ada koordinasi atau sosialisai antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat.Mengenai undang-Undang yang sudah	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									PPR, sehingga Kegiatan yg dilakuakan monev pelabuhan pengumpulan data survey man	ditetapkan. dan akan sampai kapan Pemerintah pusat akan Menyerahkan Pelimpahan P3D terkait PPR	
				Program Pengelolaan Perkeretaapian							
					Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (Satuan : %)	**15**	**15,00**	**100,00**	**Ada Beberapa Belanja Pendukungg Tidak Dapat Dibelanjakan (sppd Luar Daerah) Terkait Pandemi Covid 19**	**Rasionalisasi Kegiatan Dan Anggaran Pada Perencanaan Berikutnya**	**-**
				Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi							
				Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi							
					Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian (Satuan : unit)	*3*	1,00	33,33	2 Kegiatan di triwulan IV di Pindahkan ke Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan dijalan	sudah di konfirmasi kepada Pimpinan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasala han	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Provinsi yaitu Pemeliharaan Gedung Pos Jaga Perlintasan dan Pemeliharaan Alat pada Pos Perlintasan Sebidang		

Sumber SAKIP Dishub 2021

3.3. PENGUKURAN KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

Pengukuran capaian kinerja dibandingakan dengan target pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Berbanding Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Utama	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian 2021 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	3,0	2,53	84,00	-	-	-
			Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	-	-	-	100	97,62	97,62
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	-	-	-	100	98,00	98,00
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran	-	-	-	100	70,00	70,00

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Utama	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian 2021 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		
			yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %) (UPTD)						
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	-	-	-	100	100	100
			Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	-	-	-	100	100	100
2.	Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan lalulintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perencanaan Transportasi yang diterapkan (Satuan : %)	50	50	100	20,00	20,00	100,00
3.	Meningkatnya pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi (Satuan: %)	100,00	25,97	25,97	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Utama	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian 2021 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		
		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pengendalian. penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan (Satuan: %)	100,00	37,66	37,66	100,00	100,00	100,00
			Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	-	-	-	-	-	-
			Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	20,00	50,00	250,00	-	-	-
			Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (Satuan :%)	-	-	-	20,00	20,00	100,00
			Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Jalan (Satuan : %)	-	-	-	15,00	15,00	100,00
			Persentase ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana Transportasi (Satuan : %)	-	-	-	30,77	30,77	100,00
			Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Sarana	-	-	-	20,00	19,97	99,85

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Utama	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian 2021 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		
			Transportasi Darat (Satuan: %)						
			Prosentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (Satuan: %)	-	-	-	10,00	10,00	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	20,00	27,89	139,45	15,00	15,00	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)	-	-	-	-	-	-
			Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Satuan:%)	-	-	-	100,00	87,77	87,77
			Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (Satuan : %)	-	-	-	100,00	100,00	100,00
			Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan : %)	-	-	-	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Utama	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian 2021 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		
			Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan : %)	-	-	-	100,00	88,53	88,53

Sumber: SAKIP 2021

3.4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA IKU TAHUN 2021 DENGAN TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA TAHUN 2017-2022

Pada Tabel ini disampaikan perbandingan kinerja dari indicator kinerja sasaran strategis (IKU) tahun 2021 dengan target kahir dari periode Renstra/ RPJMD tahun 2017-2022 sebagai mana tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2021 dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI		CAPAIAN
				2020	2021	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	76,73	66,9	66,9
2	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalulintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara (%)	90	100	100	100
3	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi (%)	20	20	20	20

Sumber: Dinsa Perhubungan Provinsi Banten

3.5. CAPAIAN FISIK KEGIATAN TAHUN 2021 DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selain capain program ada juga capaian kegiatan sebagai bahan evaluasi kinerja sebagai pencapaian target kinerja pada Dinas Perhubungan, dimana dalam capaian kegiatan ini ada beberpa kegiatan yang tidak samapai 100% dalam serapan keuangan, hal ini di karenakan beberapa persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.9. Relaisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2021

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (INDUK)	**53.923.545.000**	**100**	**99**	**99**	**50.092.648.459**	**3.830.896.541**	**92,90**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**37.443.867.013**	**100**	**98**	**98**	**34.260.905.811**	**3.182.961.202**	**91,50**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**448.269.000**	**15**	**14**	**98**	**261.814.250**	**186.454.750**	**58,41**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.169.000	1	1	100	25.635.000	40.534.000	38,74
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.200.000	1	1	100	4.540.000	10.660.000	29,87
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	1	1	100	5.235.000	4.765.000	52,35
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.800.000	1	1	100	9.806.000	3.994.000	71,06
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	1	1	100	4.652.000	5.348.000	46,52

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	185.500.000	4	4	100	170.877.250	14.622.750	92,12
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.600.000	6	5	83	41.069.000	106.531.000	27,82
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.606.233.325**	**32**	**32**	**100**	**23.096.369.895**	**2.509.863.430**	**90,20**
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.709.123.325	14	14	100	22.559.020.895	2.150.102.430	91,30
9)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	787.110.000	1	1	100	468.770.000	318.340.000	59,56
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.210.000	2	2	100	25.050.000	25.160.000	49,89
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000	12	12	100	962.500	187.500	83,70
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	28.491.000	1	1	100	16.167.000	12.324.000	56,74
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.824.000	1	1	100	26.074.500	3.749.500	87,43
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	325.000	1	1	100	325.000	-	100,00
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**19.100.000**	**3**	**3**	**100**	**17.886.900**	**1.213.100**	**93,65**
15)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.100.000	1	1	100	4.100.000	-	100

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
16)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	1	1	100	3.800.000	1.200.000	76
17)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	1	1	100	9.986.900	13.100	99,87
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**48.000.000**	**2**	**2**	**100**	**45.296.450**	**2.703.550**	**94,37**
18)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000	1	1	100	7.500.000	2.500.000	75,00
19)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.000.000	1	1	100	37.796.450	203.550	99,46
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.145.635.513**	**53**	**53**	**100**	**921.544.214**	**224.091.299**	**80,44**
20)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	440.244.863	12	12	100	371.598.314	68.646.549	84,41
21)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	374.386.650	12	12	100	316.936.750	57.449.900	84,65
22)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.330.000	1	1	100	70.730.650	20.599.350	77,45
23)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.430.000	12	12	100	51.149.500	11.280.500	81,93
24)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.304.000	12	12	100	108.189.000	66.115.000	62,07
25)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.940.000	12	12		2.940.000	-	100,00
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**350.717.175**	**2**	**2**	**100**	**346.863.870**	**3.853.305**	**98,90**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
26)	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	250.717.175	1	1	100	247.026.870	3.690.305	98,53
27)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	1	1	100	99.837.000	163.000	99,84
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.430.542.000**	**13**	**13**	**100**	**8.297.283.734**	**133.258.266**	98,42
28)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.430.542.000	13	13	100	8.297.283.734	133.258.266	98,42
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.395.370.000**	**65**	**53**	**100**	**1.273.846.498**	**121.523.502**	**91,29**
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.340.000	12	12	100	-	2.340.000	0
30)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	725.170.000	12	12	100	677.606.836	47.563.164	93,44
31)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	12	12	100	149.611.680	388.320	99,74
32)	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2.500.000	12			2.500.000	-	100,00
33)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	1	1	100	99.888.000	112.000	99,89
34)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	387.360.000	1	1	100	316.542.840	70.817.160	81,72

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	Bangunan Lainnya							
35)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	12	12	100	27.697.142	302.858	98,92
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**15.998.304.237**			**98**	**15.440.264.071**	**558.040.166**	**96,51**
9	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**550.000.000**	**4**	**4**	**100**	**533.822.000**	**16.178.000**	**97,06**
36)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	550.000.000	4	4	100	533.822.000	16.178.000	97,06
10	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**2.081.770.000**	**10**	**10**	**100**	**2.033.036.737**	**48.733.263**	**97,66**
37)	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	2.081.770.000	10	10	100	2.033.036.737	48.733.263	97,66
11	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**12.759.450.237**	**1288**	**1287**	**91**	**12.313.575.034**	**445.875.203**	**96,51**
38)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	51.296.000	1	1	100	28.351.000	22.945.000	55,27
39)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	11.187.872.237	100	100	100	10.932.370.834	255.501.403	97,72
40)	Pengawasan dan Pengendalian	1.424.818.000	100	100	100	1.303.203.200	121.614.800	91,46

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi							
41)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	95.464.000	100	0	0	49.650.000	45.814.000	52,01
12	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**237.936.000**	**3**	**3**	100	**229.631.500**	**8.304.500**	**96,51**
42)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-	1	1	100	-	-	-
43)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	37.936.000	1	1	100	36.781.500	1.154.500	96,96
44)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	200.000.000	1	1	100	192.850.000	7.150.000	96,43
13	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**369.148.000**	**2**	**2**	**100**	**330.198.800**	**38.949.200**	**89,45**
45)	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	369.148.000	2	2	100	330.198.800	38.949.200	89,45

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**353.143.750**	**100**	**100**	**100**	**280.253.777**	**72.889.973**	**79,36**
14	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	**133.843.750**	**100**	**100**	**100**	**70.776.277**	**63.067.473**	**52,88**
46)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65.400.000	1	1	100	35.209.802	30.190.198	53,84
47)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	68.443.750	1	1	100	35.566.475	32.877.275	51,96
15	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**199.700.000**	**4**	**4**	**100**	**195.196.000**	**4.504.000**	**97,74**
48)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	199.700.000	4	4	100	195.196.000	4.504.000	97,74
16	**Pembangunan, Penerbitan Izin**	**19.600.000**	**1**	**1**	**100**	**14.281.500**	**5.318.500**	**72,86**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							
49)	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19.600.000	1	1	100	14.281.500	5.318.500	72,86
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**128.230.000**	**15**	**15**	**100**	**111.224.800**	**17.005.200**	**86,74**
17	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**128.230.000**	**15**	**15**	**100**	**111.224.800**	**17.005.200**	**86,74**
50)	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	128.230.000	15	15	100	111.224.800	17.005.200	86,74
	UPTD							
V	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**377.078.000**			**100**	**262.603.541**	**114.474.459**	**69,64**
18	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**205.078.000**	1	1	100	**120.543.841**	**84.534.159**	**58,78**
51)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	1	1	100	29.644.297	40.355.703	42,35
52)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.100.000	1	1	100	58.895.544	11.204.456	84,02
53)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.978.000	1	1	100	32.004.000	32.974.000	49,25
19	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**172.000.000**	**1**	**1**	**100**	**142.059.700**	**29.940.300**	**82,59**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	Daerah							
54)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	1	1	100	96.014.700	23.985.300	80,01
55)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	1	1	100	46.045.000	3.955.000	92,09
56)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	1	1	100	-	2.000.000	0
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**133.380.000**	**100**	**100**	**100**	**70.776.277**	**62.603.723**	**53,06**
20	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	133.380.000	100	100	100	70.776.277	62.603.723	53,06
57)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	133.380.000	100	100	100	70.776.277	62.603.723	53,06
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**55.290.000**	**100**	**89**	**89**	**54.800.000**	**490.000**	**99,11**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
21	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	55.290.000	100	89	89	54.800.000	490.000	99,11
58)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	55.290.000	100	89	89	54.800.000	490.000	99,11
TOTAL		54.489.293.000			98	50.480.828.277	4.008.464.723	92,64

Sumber: Penghitungan tahun 2021

Pagu akhir Dinas Perhubungan TA 2021 sebesar Rp. 54.489.293.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.480.828.277,- atau sebesar 98,00% ,Sisa anggaran belanja dari Dinas Perhubungan tahun 2021 sebesar Rp. 4.008.464.723,-. Berasal dari sisa anggaran. Adapaun pencapaian fisik sebesar 92,64%.

3.6. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Perhubungan terdapat beberapa permasalahan baik secara teknis / non teknis secara umum permasalahan adalah pandemic covid-19 secara global yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif. Sehingga diperlukan beberapa kegiatan mengumpulkan orang tidak dapat dilaksanakan.

3.61. PERMASALAHAN

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah memetakan permasalahan tersebut berupa:

1. Pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara semi virtual, belanja pendukung SPPD tidak maksimal dapat dibelanjakan.
2. Penyusunan mengalami keterlambatan mengikuti jadwal dari TAPD Provinsi Banten.
3. Beberapa kegiatan belum masuk ke dalam DPA (inovasi daerah, pengelolaan website / PPID, Daftar Penilaian Resiko (DPR), penyusunan proses bisnis.
4. belanja pendukung SPPD tidak maksimal dapat dibelanjakan; 2. RADGRK tidak diselenggarakan terkait pandemi covid-19.
5. Gaji dan tunjangan belum mencukupi s.d akhir tahun anggaran (gaji 14 bulan dan tukin 12 bulan.
6. masih terdapat laporan terkait kerusakan asset bmd di lapangan, pju, rambu
7. terdapat data yang membingungkan pada aplikasi atisisbada.
8. Pada target Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai tertulis 1 tahun, tapi pelaksanaan dilaksanakan perbulan, sehingga untuk output dari sub kegiatan ini tercapai.
9. Realisasi serapan anggaran tidak sesuai target anggaran (rakas), dikarenakan adanya revisi pada proses administrasi terkait pembuatan kontrak dan diberlakukannya kerja

WFH yang berdampak lamanya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan realisasi serapan.

10. Terlambatnya (beberapa bulan) pembayaran listrik dikarenakan kerja wfh.
11. Belum terbangunnya Prasarana Transportasi di WIlayah Provinsi Banten.
12. Belum tersedianya Sarana angkutan umum massal di Wilayah Provinsi Banten dan pemenuha Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
13. Pelaksanaan pengadaanar mature LPJU tidiak bisa dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan PPKM Covid19 dikarenakan pabrikasi/tempat produ KSI bertempat di luar daerah Banten.
14. Persiapan sudah dilaksanakan tetapi karena meningkatnya pandemi covid yg
15. meningkat dan kegiatan mengumpulkan orang banyak sehingga dibatalkan sesuai dengan surat edaran kementrian Perhubungan No.AJ.506/01/01/AJ/VI/2021 tentang Pemberitahuan Peniadaan Kegiatan.
16. Tidak Terlaksana secara maksimal Kegiatan Perjalanan Dinas Dikarnakan Mengacu Pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/1387-bkd/2021 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Berpergian Keluar Daerah

3.6.2. SOLUSI

Dari permasalahan yang dihadapi maka perlu solusi yang dibuat untuk menggapi permasalahan ini, untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Kondisi Dan Anggaran Yang Tersedia.
2. koordinasi dengan stackholder dan mitra perhubungan, Rasionalisasikan perencanan anggaran.
3. Koordinasi dengan Tim TAPD Provinsi Banten.
4. koordinasi dengan pihak terkait mrll, kereta api dan sarana prasarana) untuk segera dilakukan pemeliharaan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat.

5. Koordinasi dengan pimpinan, melakukan rasionalisasi anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Koordinasi dengan bagian terkait dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Koordinasi dengan pimpinan, melaksanakan sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam capaian indikator sub kegiatan.
8. Untuk kegiatan yang ditunda atau tidak dilaksanakan telah dibuat surat pernyataan atau dilakukan percepatan pada bulan berikutnya.
9. Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai arahan pimpinan diluar jadwal WFO.
10. Tetap Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
11. Rasionalisasikan Perencanaan Anggaran Keuangan.

3.7. ANALISA EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang di emban melalui perjanjian kinerja, anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan dalam menyelesaikan program dan kegiatan pada tahun 2021 dimana target anggran sebesar Rp. 54.489.293.000 dengan realisasi sebesar Rp. 50.480.828.277 dengan capaian 92,64% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.008.464.723 atau 7,36%.

Tabel 3.10. Analisa Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA			PENDANAAN (Rp)			TINGKAT EFISIENSI	
			Target	Realisasai	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Rp.	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	66,9	78,70	37.820.945.013	34.523.509.352	91,50	3.297.435.661	8,50
2	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalulintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara (%)	100	100	100	16.351.447.987	15.720.517.848	96,14	630.930.139	3,86
3	Meningkatnya Kinerja pelayanan,	Persentase kebutuhan sarana dan	20	20	20	316.900.000	236.801.077	74,72	80.098.923	25,28

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA			PENDANAAN (Rp)			TINGKAT EFISIENSI	
			Target	Realisasai	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Rp.	%
	pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	prasarana transportasi (%)								
						54.489.293.000	50.480.828.277	92,64	4.008.464.723	7,36

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

LKIP Pemerintah Provinsi Banten merupakan kompilasi dari seluruh LKIP organisasi perangat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, termasuk didalamnya LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Banten dan Renstra Dinas Tahun 2017–2022, Dinas Perhubungan Provinsi Banten, memiliki 4 program, 21 kegiatan dan 58 sub kegiatan dimana pada tahun 2021 jumlah anggaran Rp. 54.489.293.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.480.828.277,- atau sebesar 98,00% ,Sisa anggaran belanja dari Dinas Perhubungan tahun 2021 sebesar Rp. 4.008.464.723,-. Berasal dari sisa anggaran. Adapaun pencapaian fisik sebesar 92,64%.